

HARJO SUSMORO



BELA NEGARA UNTUK PEJABAT

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI

BELA NEGARA
UNTUK PEJABAT NEGARA

HARJO SUSMORO

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI



Buku

BELA NEGARA UNTUK PEJABAT

Hal. viii + 36

Uk. Buku : 12,5 x 20 cm

Penulis : Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Oplsia

Editor : Haryo Budi Rahmadi
Gery Gugustomo

Website : <http://www.wantannas.go.id>

Penerbit : Setjen Wantannas RI

Cetakan : Ke-1, Februari 2023

ISBN :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,000 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,000 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,000 (empat miliar rupiah).

Daftar Isi

Kata Pengantar	vi
Bela Negara untuk Pejabat	viii
BAGIAN SATU	
Pejabat di tengah Pergeseran Lingkungan Strategis	1
Siapakah Pejabat Negara?	1
Lingkungan Strategis di Sekitar Pejabat	5
BAGIAN DUA	
Memaknai Bela Negara Bagi Pejabat Negara	11
Amanat Konstitusional dan Yuridis Bela Negara dalam	
Konteks Pejabat Negara	11
Lingkungan Yuridis Pejabat Negara	13
BAGIAN TIGA	
Perspektif Pejabat Negara terhadap Nilai-Nilai	15
Dasar Bela Negara	
Cinta Tanah Air	15
Sadar Berbangsa dan Bernegara	17
Yakin Setia pada Pancasila	18
Rela Berkorban	20
Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara	23

BAGIAN EMPAT

Pejabat Negara sebagai Agen Problem Solving Bela Negara	27
Geografi	28
Demografi	29
Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup	29
Ideologi	30
Politik	31
Ekonomi	32
Bidang Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, dan Telematika	33
Pertahanan Keamanan	34
Daftar Pustaka	36
Tentang Penulis	38

Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum Wr Wb, Oom Swastiastu, Namo Budhaya, Shalom, Salam Kebajikan.

Alhamdulillahirabbil 'alamiin puji syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh Azza wa Jalla atas berkah dan rahmah-Nya lah buku kecil ini yang membahas mengenai bela negara untuk pejabat negara dapat dirampungkan. Diawali dengan penuh kesadaran bahwa "tak ada gading yang tak retak", buku ini menyadari keberadaannya sebagai penyumbang pasak-pasak kecil penjaga kehadiran pemerintah dan negara di tengah rakyat yang mereka layani. Namun demikian, topik ini jua sejatinya adalah topik kritis yang memiliki spektrum yang sangat luas karena tak pelak dapat memengaruhi kesejahteraan warga negara, kesehatan demokrasi, dan bahkan, stabilitas negara.

Di dalam buku ini akan disinggung hal-hal terkait hubungan antara pejabat negara dengan rakyat yang secara teknis adalah konstituen sekaligus konsumen pemerintah dan negara yang kebutuhannya harus dilayani dengan baik. Sekali lagi jika dilihat secara lebih luas, buku ini membentangkan hubungan pelayanan tersebut jauh melebihi masalah kebijakan dan birokrasi belaka. Demikianlah sejatinya bela negara, seorang pejabat negara yang berwawasan bela negara harus menyadari segenap faktor-faktor mendasar yang berkontribusi pada keberadaannya sebagai pejabat, keberadaan rakyat, dan tentunya keberadaan negara yang menjadi wadah besar bersama. Hal ini dapat melintas kondisi geografis dan demografis,

hingga perbedaan ideologis atau agama, dan bahkan masalah pertahanan dan keamanan.

Pejabat negara dengan demikian perlu menyadari bahwa ada banyak cara untuk mewujudkan bela negara sesuai kapasitas mereka, tentunya dari perubahan birokrasi dan manajerial, kesadaran dan etika politik, kepatuhan hukum, hingga kepekaan sosial dan budaya. Namun, wujud bela negara yang paling berdampak akan datang dari diri pribadi pejabat itu sendiri, yang harus bertindak nyata dalam mewujudkan bela negara. Mereka dapat mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran rakyat, bersikap transparan dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, dan bertindak dengan integritas dan kecintaan terhadap rakyat. Mereka juga dapat mendayagunakan teknologi dan inovasi untuk lebih terhubung dengan rakyat yang mereka layani, dan senantiasa menciptakan perubahan positif di berbagai tataran.

Kesimpulannya, melayani rakyat bukan hanya sebuah tugas bagi seorang pejabat, tetapi panggilan untuk bertindak nyata sebagai wujud bela negara. Perlakukan buku ini bukan sebagai panduan, tetapi sebagai tantangan bagi segenap pejabat terpilih, untuk semakin memperhatikan rakyat dan berkomitmen untuk melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan pengabdian kepada rakyat dan negara. Jika ada Profil Pelajar Pancasila, Pengusaha Nasionalis, maka buku ini dapat menjadi cikal Profil Pejabat Bela Negara. Mari bersama-sama kita buat negara kita lebih kuat dan bangsa kita lebih adil.

Terima kasih

Wassalaamu'alaikum Wr Wb, Oom Santi, Santi, Santi, Oom

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla

BELA NEGARA UNTUK PEJABAT NEGARA

BAGIAN SATU

Pejabat di tengah Pergeseran Lingkungan Strategis

Siapakah Pejabat Negara?

Pejabat negara pada dasarnya adalah mereka yang bekerja pada pemerintah atau lembaga negara dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mereka dapat mencakup peran seperti administrasi, pendidikan, keuangan, keamanan, dan lain sebagainya. Secara umum para pejabat ini meliputi mereka yang kita kenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang bekerja di bawah mereka pemerintah secara sektoral di kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (K/LPNK), pemerintahan daerah (Pemda) yang mungkin juga lebih sering disebut pejabat daerah, serta aparat pertahanan keamanan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Tak luput tentunya termasuk juga lembaga-lembaga tinggi negara di luar kekuasaan eksekutif seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Konstitusi (MK), dan bahkan pejabat Bank Indonesia (BI) dan

beragam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meskipun merupakan badan usaha namun bermodalkan uang dari negara.

Di sisi lain, kita juga mengenal adanya istilah pejabat pemerintah. Istilah tersebut, menurut C.F Strong, memiliki konsekuensi dari pengertian pemerintah yang lebih sempit, mengacu pada fungsi eksekutif saja, sehingga seseorang yang memegang jabatan di dalam fungsi eksekutif disebut pejabat pemerintah. Sedangkan pejabat negara merupakan konsekuensi dari pengertian pemerintah, dalam arti luas yaitu pemerintah sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga seseorang yang memegang jabatan di antara ketiga fungsi tersebut disebut pejabat negara karena menjadi bagian dari kelengkapan negara. Sedangkan, pemerintah dalam arti sempit hanya (Dramanda, 2014). Buku ini akan melihat “pejabat” dari ruang lingkup yang lebih luas.

Ketika mendengar kata "pejabat" ini, persepsi publik umumnya akan langsung mengarah kepada petinggi-petinggi organisasi pemerintah. Mereka yang mendapat beragam fasilitas dinas seperti mobil khusus dengan plat khusus, rumah khusus dengan lokasi, perabot, dan penjagaan yang khusus, dan lain sehususnya.

Namun demikian, sebenarnya pejabat negara pun memiliki beragam tingkatan yang berbeda-beda, dan tentunya dengan fasilitas, dan tampilan yang tak mesti nampak khusus. Sebagai contoh, seorang carik atau Sekretaris Desa adalah pejabat yang memiliki peran strategis di desa, meskipun secara relatif tentu tidak sekuat

Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Daerah, dan terlebih lagi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Secara sederhana mereka dapat ditengarai dari jabatan yang diembannya di berbagai tataran. Jika pada seorang pegawai pemerintah tersemat judul sekretaris, asisten, pembantu, wakil, kepala, deputi, direktur, dan sebagainya, maka cukuplah ia disebut sebagai pejabat negara. Demikian pula dalam bidang pertahanan keamanan, jika terdapat kata komandan, perwira, bahkan bintangara, bolehlah ia disebut pejabat.

Yang pasti, tidak hanya petinggi-petinggi pemerintah seperti yang umum dipersepsikan secara mentereng oleh masyarakat luas, pejabat negara pada tataran yang relatif rendah pun memiliki perbedaan kewenangan, tugas, dan tanggungjawab yang harus diemban ketika berhadapan dengan rakyat kebanyakan yang merupakan konstituen sekaligus konsumen dari pemerintah dan negara. Apa sajakah kelebihan itu?

Pertama adalah pekerjaan tetap. ASN menikmati tingkat keamanan kerja yang tinggi dan pendapatan yang stabil, menjadikannya pilihan karir yang diinginkan banyak orang.

Kedua adalah keberadaan tunjangan. Di luar gaji pokok, ASN menerima bentuk-bentuk tunjangan seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan untuk para pejabatnya, hingga asuransi kesehatan, fasilitas non finansial, dan khususnya yang paling dicari dari ASN adalah pensiun atau tunjangan hari tua.

Ketiga, ASN mendapat peluang untuk kemajuan karir di samping pengembangan profesional meskipun mungkin terbatas dan sangat ketat. Masih ada pula peluang serupa bagi ASN yang melaksanakan tugasnya dengan baik.

Terakhir, yaitu pencapaian diri. Banyak ASN menemukan rasa pemenuhan dan kebanggaan dalam profesi mereka terlebih ketika dikaitkan dengan peran yang mereka jalankan bagi masyarakat dan negara.

Sebagai tambahan informasi, keseluruhan pegawai pemerintah yang jumlahnya tak mencapai 5(lima) persen penduduk Indonesia, ternyata mendapat alokasi anggaran gaji mencapai sekitar 18% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Jika ASN kerap disebut sebagai abdi negara, maka sadarilah bahwa komponen utama keberadaan negara apapun adalah rakyatnya.

Tanpa rakyat, negara tidak akan memiliki pemerintahan, tanpa rakyat, pemerintahan menjadi tidak relevan, dan tanpa rakyat, negara seluas apapun hanya akan menjadi bentangan kosong belaka. Maka ASN tentunya adalah abdi rakyat dan para pejabatnya bertanggungjawab untuk menjadi pengawas, pengelola, dan pengarah pengabdian kepada rakyat seutuhnya.

Demikian pula untuk aparat pertahanan keamanan, bukan abdi negara julukan yang mereka terima, melainkan Benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhayangkara Negara. Dengan demikian aparat pertahanan keamanan secara mutlak

merupakan Benteng Rakyat dan Bhayangkara Rakyat. Alhasil sadarilah pula bahwa pejabat negara tak lain tak bukan adalah rakyat jua yang secara khusus mengemban kewajiban untuk memastikan pengabdian terbaik kepada rakyat seutuhnya.

Lingkungan Strategis di Sekitar Pejabat

Pada bagian ini akan diberikan gambaran umum mengenai persepsi ancaman faktual dan potensial yang terkait kehidupan pejabat negara pada tiap-tiap gatra Ketahanan Nasional.

Geografi

Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan bentang alam yang sangat beragam meliputi lautan, pantai dan pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, padang rumput dan pasir, hingga hutan heterogen yang lebat, dan pegunungan bersalju (yang akan segera hilang). Selain itu, posisi geologis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng tektonik dan rangkaian gunung api aktif, dan juga posisi iklim yang cukup kerap mendatangkan anomali cuaca di Indonesia, terdapat aspek non-geologis, non-klimatologi yang menimbulkan ancaman tersendiri yaitu geopolitik.

Posisi silang Indonesia yang strategis di antara dua benua dan samudera merupakan berkah diplomasi dan logistik global, serta peluang ekonomi yang luar biasa. Dalam kenyataannya, posisi demikian juga telah cukup sering meletakkan Indonesia di tengah imbas konflik dan sengketa perbatasan. Namun demikian, terdapat pula ancaman potensial yang dapat timbul dari kegagalan

memanfaatkan peluang diplomasi dan ekonomi yang bisa diraih dari posisi silang Indonesia yang strategis ini.

Demografi

Kembalinya tendensi peningkatan pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang timpang akan berdampak kepada kualitas penduduk. Dalam konteks yang dihadapi oleh pejabat negara, tantangan yang muncul bukan hanya kompleksitas dan kualitas layanan publik semata, namun juga kualitas input calon ASN yang akan mendampak kinerja pemerintah dan negara. Selain itu daya tampung sektor pemerintahan sebagai penyerap sumberdaya manusia juga akan terpengaruh.

Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang tidak bertanggung jawab semakin mewujud di sekeliling kita, perhatikan betapa pemandangan alam yang bersih dan asri sudah menjadi komoditas komersial. Selain itu, ASN pun tak lepas dari meningkatnya konsumsi energi listrik dan bahan bakar minyak, serta tren belanja online yang meningkatkan sampah kemasan. Bahkan kantor-kantor pemerintah juga bertanggungjawab atas berkurangnya lahan hijau, dan penyempitan jalur alami air, yang kesemuanya tidak bisa lepas dari peningkatan pencemaran dan penurunan daya dukung lingkungan.

Dalam konteks yang lebih luas, alam akan kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan beragam kebutuhan manusia

seperti hasil bumi khususnya pangan, dan akibatnya semakin banyak produk yang harus diimpor. Lingkungan yang buruk pada gilirannya tidak hanya memicu atau memperburuk bencana, namun juga meningkatkan potensi konflik, kemiskinan, dan wabah penyakit. Perhatikan bahwa, pola penggunaan energi khususnya listrik dan migas yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi.

Ideologi

Pejabat negara adalah rakyat jua yang kian terpapar oleh beragam hal-hal baru di tengah era serba digitalisasi. Di dalamnya terdapat muatan-muatan informasi yang mengandung nilai dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti etatisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, separatisme, dan hedonisme. Namun demikian, saat ini juga semakin banyaknya pembahasan ide-ide yang sebenarnya berpotensi bertentangan dengan Pancasila dilakukan atas nama reformasi birokrasi dan membuat pelayanan publik semakin mekanistik, materialistik, inderawi, dan meninggalkan dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Jika pejabat negara hanya mampu menjadikan Pancasila dan akhlak sebagai retorika simbolik, maka bagaimanakah nasib rakyat yang telah memercayakan negara di tangan para pejabat tersebut?

Politik

Ancaman faktual yang dihadapi di bidang politik terutama adalah menguatnya politik transaksional dan kepentingan yang sempit bagi golongan tertentu di atas kepentingan rakyat banyak. Pragmatisme

politik demikian menjadi akar bagi segala praktik non-etik dalam kehidupan nasional seperti politik uang, jual beli kebijakan dan hukum, hingga politisasi SARA dan identitas. Dalam kaitannya dengan pejabat negara, netralitas aparatur negara khususnya TNI, Polri, dan ASN terganggu dengan makin banyaknya political appointee. Sebagai hasilnya, apatisme rakyat meningkat dan demokrasi pun terancam rusak.

Ekonomi

Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang ekonomi dapat dikatakan merupakan ancaman klasik seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, hingga belum mantapnya minat kewirausahaan masyarakat. Sayangnya, mentalitas birokratis ASN dan proses kebijakan pada umumnya juga tidak sesuai dengan gerak perekonomian yang lebih cepat dan dinamis. Sementara itu, pencapaian material semakin menjadi ciri keberhasilan dan standar kesuksesan kehidupan masyarakat, termasuk ASN. Pada tataran makro, ancaman yang dihadapi berupa korupsi dan kebocoran anggaran negara juga bukan hal yang baru. Selain itu perekonomian nasional juga semakin rentan serbuan produk asing melalui lokapasar dan terimbas fluktuasi perekonomian global pada umumnya. Dalam kondisi demikian, pendekatan klasik dan neoklasik teoretis ala buku-buku teks pendidikan tinggi jelas kontraproduktif.

Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, dan Telematika

Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang sosial budaya terutama adalah pelunturan identitas nasional dan manipulasi kebhinnekaan yang justru kian kerap disalahgunakan untuk menyudutkan golongan-golongan tertentu dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Perubahan kebijakan pendidikan yang sangat disruptif serta dampak negatif teknologi informasi mendampak kinerja ASN melalui ketergantungan teknologi serta kelemahan karakter input SDM yang tersedia. Dalam hal ini salah satu contoh menonjol adalah ketergantungan terhadap teknologi dan energi listrik, serta mentalitas dan etika digital yang kian senjang dengan kenyataan riil di lapangan. Sementara itu, banyak potensi IPTEK anak bangsa yang dapat mencegah ketergantungan dan penguasaan teknologi oleh asing masih luput dari dukungan para pemangku kepentingan. Contoh menonjol dalam hal ini adalah kecenderungan spesifik dunia medis nasional pasca serangan virus corona untuk mengadopsi IPTEK dan bahkan kebijakan asing, sementara paradigma medis nasional yang lebih berlandaskan kearifan lokal dan kekhasan indikasi geografis malah nyaris terlupakan.

Pertahanan Keamanan

Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang pertahanan keamanan (hankam) terutama adalah ancaman hibrida yang terpicu dari bidang lain di luar bidang militer sehingga tidak dapat dihadapi dengan kekuatan senjata semata, sebagai contoh yaitu konflik dan

perkembangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta konflik sosial, budaya, IPTEK, dan ekonomi.

Ancaman faktual yang spesifik di bidang hankam pun sedang meningkat kembali berupa separatisme dan pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI yang semakin menuntut sinergi diplomasi dan kekuatan senjata. Adapun ancaman potensial berupa invasi/agresi militer negara asing tetap merupakan ancaman yang tidak boleh dikesampingkan dalam masa apapun. Ancaman invasi/agresi militer negara asing menuntut kesiapan implementasi Sishankamrata dan Strategi Perang Berlarut untuk menghadapinya.

BAGIAN DUA

Memaknai Bela Negara Bagi Pejabat Negara

Amanat Konstitusional dan Yuridis Bela Negara dalam Konteks Pejabat Negara

Partisipasi dan keikutsertaan seluruh warga negara, termasuk pejabat negara dalam membela negara merupakan amanah dari konstitusi dan yuridis yang berlaku di Indonesia.

Secara konstitusional, amanat bela negara terdapat dalam UUD NRI 1945 yaitu pada BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk di dalam Pasal 27 Ayat (3).

Sementara pada tataran undang-undang, landasan karakter bela negara dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa "Upaya Bela Negara" adalah "sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara".

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) UU Pertahanan Negara, secara substansial merujuk kepada daya implementasi program Aksi Nasional Bela Negara agar dapat memenuhi amanat Pasal 68 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana segenap warga negara dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perwujudannya, karakter bela negara bertransformasi menjadi upaya bela negara yang, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Secara hakiki, dengan demikian bela negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap bangsa dan warga negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, dan kehormatannya untuk menghadapi segala macam Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi "Upaya Bela Negara" atau yang oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun

2018-2019 (Inpres 7/2018) dipertegas sebagai "Aksi Nasional Bela Negara".

Dengan begitu, upaya bela negara juga dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan kesadaran warga negara. Ketika kesadaran tersebut telah terwujud, maka akan terbentuk suatu aksi yang mensinergikan perwujudan kesadaran segenap elemen masyarakat dan bangsa untuk mewujudkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan persatuan bangsa dan negara, demi mewujudkan negara yang berdaulat adil dan Makmur (Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara, 2018b).

Lingkungan Yuridis Pejabat Negara

Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat negara diklasifikasikan mulai dari Presiden hingga Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. UU tersebut juga mengatur pegawai negeri yang menjadi pejabat negara. Klasifikasi jabatan akan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban seseorang yang menduduki jabatan tersebut.

BAGIAN TIGA

Perspektif Pejabat Negara terhadap Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Cinta Tanah Air

Menurut Suyadi (2013) cinta tanah air merupakan “sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Lebih konkrit-nya cinta tanah air adalah suatu perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara untuk mengabdikan, memelihara, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.”

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa cinta tanah air merupakan suatu perasaan yang timbul dari hati dan jiwa seseorang sehingga menimbulkan rasa peduli, rasa bangga, rasa setia kepada tanah airnya sendiri yang kemudian ditujukan dengan sikap dan perilaku yang tercermin dalam diri warga negara untuk membela dan mengabdikan kepada tanah airnya serta melindungi dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar.

Tanah air bukan hanya berarti secara letterlijk dipahami untuk mencintai tanah dan air semata. Akan tetapi, secara gambaran besar, hal tersebut dimaknai sebagai kecintaan terhadap keutuhan wilayah, termasuk segala isinya. Mulai dari orang-orang hingga berbagai jenis kekayaan alam yang ada di dalam wilayah tersebut. Melalui interaksi antara wilayah, manusia, dan kekayaan alam, munculnya seperangkat ide untuk menggapai cita-cita atau yang biasa disebut ideologi, disusul pula interaksi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Keseluruhannya merupakan aspek kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan keseluruhannya harus dicintai.

Seseorang yang telah jatuh cinta, tentu tidak ingin apa yang dicintainya terganggu, apalagi sampai terancam musnah. Pejabat negara dengan segenap wewenang yang telah diamanatkan dan kepemimpinan Pancasila, akan memandu manusia Indonesia dari kondisi saat ini menuju kondisi masa depan yang diinginkan. Mengarungi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan menuju kondisi di mana keempat tujuan nasional terwujud.

”

Kepemimpinan bukanlah tentang memegang kendali. Ini tentang menjaga orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab Anda.

Simon Sinek

Kecintaan secara menyeluruh akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang tulus dan ikhlas untuk selalu siap menghadapi segala kondisi yang mengancam kesatuan, persatuan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Sadar Berbangsa dan Bernegara

Semua aspek yang dicintai di atas perlu wadah yaitu bangsa dan negara yang terwujud melalui kemerdekaan. Sehingga, kesadaran berbangsa bernegara adalah wujud dari kesadaran akan kemerdekaan.

Indonesia merdeka dengan APBN Nol. Karena kala itu, bukan APBN yang menjadi tolok ukur, apalagi tujuan untuk merdeka. Saat itu, “Merdeka!!” adalah ulterior motive. “Merdeka!!” menjadi jawaban tunggal, panasea, bagi segenap rindu, dendam, susah, dan harap bangsa Indonesia. Kebangsaan Indonesia berangkat dari fakta-fakta sosio-kultural-politis-historis yang lebur dalam suatu kondisi yang membuat semua orangnya berada dalam nasib, kelas, dan harapan yang sama. Tak peduli ia menak, jelata, cendekia, atau jahiliah semua toh adalah jajahan, siapa pun itu, dari ciri biologis dan kultural apa pun. Semua itu akhirnya terpecahkan dengan satu jawaban: “MERDEKA!!”

Secara leksikal, merdeka berasal dari bahasa Sanskrit, mahardika, yang artinya menjadi (kasta) yang tertinggi (Brahman). Oleh karena itu sangat tepatlah kiranya, bila Bung Karno mengatakan bahwa yang merdeka tidaklah menengadahkan melainkan hanya kepada-Nya. Diawali dengan “atas berkat Rahmat Allah”, hakikat kemerdekaan

itu kemudian dideklarasikan secara konstitusional sebagai hak segala bangsa. Maka kemerdekaan Indonesia tidak hanya memerdekakan dirinya dari penjajahan, namun meluap, menggelorakan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, di antaranya melalui Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955.

Kemerdekaan Indonesia membangun di atas reruntuhan imperium, kalimat itu disampaikan Bung Karno di dalam pidato Sidang Umum PBB ke-XV tahun 1960, yang diberi judul “To Build the World A New”. Tidak untuk membanggakan diri, namun sebagai pengingat untuk tidak akan pernah menjejak imperialisme yang menjadi anti tesis pembangunan dunia baru. Maka kemerdekaan itulah yang secara ilmiah menjadi fondasi sosial-kapital bangsa Indonesia, yang secara epistemologi disebut oleh Bung Karno sebagai Jembatan Emas, dan oleh Pak Harto dilembagakan dalam wadah quasi konstitusional (TAP MPR tentang GBHN) sebagai “Modal Dasar Pembangunan”.

Yakin Setia pada Pancasila

Kemerdekaan tidak akan dapat dicapai tanpa persatuan. Persatuanlah yang melanggengkan kemerdekaan sepanjang masa. Persatuan tercermin dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. itu pulalah yang merupakan warisan dari para founding fathers negara ini.

Pancasila sebagai dasar negara, menjadi pijakan yang kokoh dan luas, sebagai tempat berdirinya bangsa dan negara Indonesia sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pijakan yang

kokoh, Pancasila tak akan membuat segenap orang Indonesia berdiri dalam posisi menunduk meski mereka memandang tempat mereka berpijak. Karena sejauh mata memandang hingga ke tepian cakrawala di segala arah, kita memandang padang yang sama yang menjadi tempat kita berpijak.

Demikianlah Pancasila sebagai dasar negara dia menjadi tempat berpijak yang sangat luas bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berbagai keberagaman yang sangat kaya. Bung Karno pernah menyatakan pada peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 5 Juli 1958 di Istana negara, Jakarta (Soekarno, 2006):

”

National unity can only be preserved upon a basic which is larger than the nation itself. Persatuan nasional hanya dapat dipelihara kekal dan abadi jikalau persatuan nasional itu didasarkan atas satu dasar yang lebih luas daripada bangsa itu sendiri

Keluasan bidang Pancasila sebagai dasar negara tersurat dalam sifat pancasila yang sosialis melalui sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di atas segalanya, Pancasila mengamanatkan keesaan Tuhan.

Melalui sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila itu bersifat sosialis. Daripada itu dengan

adanya sila kesatu, Ketuhanan Yang Maha Esa, ia jelas bersifat religius. Hal ini membuat Pancasila bersifat sosialis-religius yang kesemuanya kita arahkan untuk kepentingan pembangunan nasional secara paripurna, dari sisi fisik dan spiritual.

Nilai-nilai Pancasila tidak hanya memperhatikan kebutuhan duniawi manusianya, akan tetapi juga kebutuhan spiritualitas-nya. Maka Pancasila sebagai pedoman nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sudah melampaui hingga kepada kebutuhan batiniah. Hal ini senada yang dikatakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno mengenai Pembebasan Irian Barat, dalam sambutan nya di Sidang Pengurus Pusat Front Nasional tahun 1963, bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan jutaan Insan Al-Kamil, membangun manusia seutuhnya dan berbahagia di kolong langit ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (KCPI, 2019). Sebuah tujuan yang juga pernah tertuang dalam TAP MPR Nomor IV tahun 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara juga menjelaskan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Rela Berkorban

Menerapkan semua nilai dasar tersebut tidak bisa secara *professional merit system*. Banyak hal yg tidak akan mendapat *rate of return* dalam waktu dekat apalagi dalam bentuk material. Namun yang pasti, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara akan bermanfaat bagi rakyat banyak, hingga anak cucuk, dalam jangka panjang. Karena Indonesia memang tidak dirancang untuk balik

modal dalam hitungan tahun, tetapi untuk eksis setidaknya seribu windu lamanya.

Jika menilik ke masa sebelum Indonesia merdeka, saat Indonesia masih berada di bawah jajahan kolonial Belanda. Banyak warga pribumi saat itu, terutama dari golongan bangsawan, di rekrut untuk mengabdikan pada negara, menempati jabatan administrasi pemerintah kolonial. Mereka mendapatkan pendidikan di sekolah khusus yang bernama *Opleiding School Voor Indlansche Ambtenare* (OSVIA), untuk kemudian menjadi ambtenar, sebutan pegawai negeri di pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi, tak semua pribumi yang menjadi ambtenar, berakhir sebagai ujung tombak program tanam paksa pemerintah kolonial Belanda, demi memperkaya *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC).

Haji Oemar Said (H.O.S) Tjokroaminoto menjadi salah satu ambtenaar yang rela menanggalkan profesinya sebagai pangreh pradja atau abdi negara yang menjanjikan kehidupan sejahtera. Tjokroaminoto lahir dari keluarga priyayi di Ponorogo, oleh karena itu, ia memiliki akses untuk masuk pendidikan di OSVIA pada tahun 1900. Kemudian setamat dari OSVIA pada tahun 1902, ia diangkat menjadi juru tulis patih Ngawi. Akan tetapi ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari ambtenaar pada tahun 1905 (Trimoyo, 2018).

Melihat perlakuan pemerintah kolonial Belanda terhadap pribumi, Tjokroaminoto rela meninggalkan zona nyaman kehidupan, kemudian memilih terjun dalam perjuangan terjun langsung dalam kehidupan penuh tantangan bersama rakyat. Setelah Sarekat Islam

(SI) berdiri, ia menjadi pemimpin pergerakan nasionalisme di Surabaya. Melalui kepemimpinannya, ia dapat melahirkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, seperti Soekarno, Kartosuwiryo, dan Musso-Alimin (Wibisono, 2020).

Cerita teladan rela berkorban juga dapat ditarik dari Gubernur pertama Jawa Timur Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo. Ia tercatat memegang 8(delapan) jabatan di dalam pemerintahan kolonial Belanda (Kurniawati, 2013). Soerjo terkenal sebagai seorang nasionalis dan membenci penindasan. Ia tak gentar untuk bentrok dengan para sinyo Belanda di OSVIA yang kerap menghina bumi putra. Meski demikian, Soerjo juga terkenal cukup bijak dalam mengekspresikan kebenciannya, agar tidak berakhir konyol (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017).

Hal itu yang mendasari keberlanjutan karirnya sebagai ambtenaar pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Meski posisinya sebagai ambtenaar, Soerjo tak pernah luput perhatiannya dari perhatian rakyat. Seperti moment Pada tahun 1933, ketika banjir melanda kawasan Porong yang masuk Kewedanaan Sidoarjo. Bencana tersebut menyebabkan banyak petani yang mengalami gagal panen. Soerjo memutuskan untuk terjun langsung memperbaiki tanggul-tanggul yang sudah rusak bersama rakyat.

”

Seorang pemimpin adalah yang terbaik ketika orang hampir tidak tahu dia ada, ketika pekerjaannya selesai, tujuannya terpenuhi, mereka akan berkata: kami melakukannya sendiri.

Lao Tzu

Bahkan saat zaman berganti ke penjajahan Jepang pun, Soerjo menjabat sebagai Syuchokan (Residen) di Bojonegoro (Kurniawati, 2013). Kepemimpinan Soerjo berlanjut ke masa awal kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mengangkat Soerjo sebagai gubernur pertama Jawa Timur.

Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

Keempat nilai sebelumnya merupakan bentuk sikap bela negara. Untuk mengaplikasikan sikap bela negara, kita harus memiliki kemampuan awal bela negara.

Merujuk kepada amanat Bela Negara dalam UUD NRI 1945 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk di dalam Pasal 27 Ayat (3), serta Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, sifat aplikatif ini merujuk kepada daya implementasi aksi bela negara. Tujuannya agar dapat memenuhi amanat Pasal 68 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana segenap warga negara dengan beragam kelebihan

dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 9 Ayat (2) huruf d UU No. 3 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan antara lain melalui pengabdian sesuai dengan profesi.

Pelibatan segenap warga negara, dari berbagai profesi, serta dengan beragam kelebihan dan kekurangannya menjadi poin penting dalam nilai dasar bela negara yang terakhir ini. Mengingat dalam proses pembangunan nasional, Indonesia akan selalu dihadapkan pada berbagai AGHT, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam seluruh sector kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai AGHT tersebut tak bisa dihadapi oleh satu orang semata, atau satu profesi semata. Lingkungan di sekitar kita akan selalu berubah-ubah setiap saat. Mengandalkan satu orang semata hanya akan menimbulkan kecenderungan untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang sebagai respon atas perubahan lingkungan sekitar. Semakin lama berulang-ulang, maka kita akan kehilangan daya adaptasi, daya tangkal, terhadap AGHT yang muncul dari perubahan tersebut.

Leon C. Megginson, Profesor Manajemen dan Marketing dari Universitas Negeri Louisiana di tahun 1963 pernah mengatakan, “berdasarkan Darwin’s Origin of Species, bukan spesies yang paling intelektual atau yang terkuat yang akan bertahan, tetapi

spesies yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan” (Tim Penulis Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, 2021).

Pada dasarnya, upaya pembelaan negara adalah menciptakan Ketahanan Nasional yang kokoh, kuat, dan handal mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita bangsa.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, sikap, dan tekad segenap warga negara untuk mengkontribusikan kemampuan terbaiknya masing-masing secara selaras, mantap, sistematis, terstruktur, terstandarisasi dan massif (Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara, 2018b).

BAGIAN EMPAT

Pejabat Negara sebagai Agen Problem Solving Bela Negara

Segala bentuk pelayanan pejabat negara sesuai kapasitasnya terhadap rakyatnya merupakan bentuk bela negara. Seiring berjalannya waktu, eskalasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terus meningkat dan semakin bervariasi. Maka bisa diperhatikan, bahwa pejabat menempati posisi yang fundamental dalam sebuah negara, dan organisasi.

Sikap kewaspadaan nasional pejabat dapat menentukan kelangsungan negara, lembaga, dan organisasi dari suatu potensi ancaman. Pun demikian pula dengan pemahamannya terhadap dinamika perubahan, kepemimpinan pejabat merupakan hal yang pertama memicu adanya perubahan dalam suatu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan menuju kondisi di masa depan yang diinginkan. Pada bagian ini akan diberikan gambaran umum mengenai bentuk-bentuk pemecahan masalah yang dapat dikontribusikan oleh pejabat negara pada tiap-tiap gatra Ketahanan Nasional.

”

Melayani orang lain adalah uang sewa yang Anda bayarkan untuk kamar Anda di bumi ini.

Muhammad Ali

Geografi

Makin bervariasinya sumber dan kejadian bencana alam di Indonesia dan dunia harus semakin menjadi perhatian khusus bagi jajaran pejabat negara dalam melaksanakan pengabdian mereka bagi rakyat. Tidak hanya yang bersifat tekto-vulkanis seperti gempa, longsor, gunung meletus, dan tsunami, namun juga hidro-meteorologis seperti banjir, badai, dlsb. Pada kenyataannya, fitur geografis Indonesia yang sangat luas dengan bentang alam yang sangat beragam telah menjadi perhatian tersendiri dalam melaksanakan pengabdian bagi rakyat.

Untuk bisa menyadari dan memahami situasi geografis tersebut, diperlukan wawasan dan tingkat intelektualitas tersendiri yang lekat dengan keberadaan, konteks, dan kapasitas selaku pejabat negara. Pejabat negara harus menyadari keberagaman geografis yang memengaruhi kebutuhan dan prioritas rakyat di tempat yang berbeda-beda, dan perlu berupaya menyesuaikan kondisi tersebut

untuk dapat meningkatkan keterjangkauan, mengoptimalkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan rakyat.

Demografi

Di tengah konstelasi demografis yang kurang kondusif, pejabat negara sebagai penjuror kehadiran negara di tengah rakyat perlu mengantisipasi bentuk-bentuk pelayanan yang tidak berdasarkan pada resep tunggal. Pengabdian kepada rakyat harus kreatif, mengena secara psikologis, personal, dan tentunya nyata. Demikian pula pejabat negara harus mampu menciptakan peluang bagi rakyat yang dilayaninya untuk dapat berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi mereka sendiri. Syaratnya, pejabat negara harus memahami susunan demografis wilayah kerja mereka yang beragam dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua suara, harapan, aspirasi, dan kebutuhan rakyat diakomodasi, terlepas dari usia, ras, jenis kelamin, agama, ataupun faktor lainnya.

Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup

Pejabat negara harus memitigasi dampak negatif dari aktifitas pemerintah dan tidak menggunakan pelayanan publik sebagai dalih untuk tidak memerhatikan lingkungan hidup. Dimulai dari kepedulian dan perilaku, sistem dan tatanan operasional yang lebih hemat energi akan menempatkan pejabat negara sebagai teladan konsumsi sumberdaya lokal dan peredam ekseseks negatif dari degradasi lingkungan hidup yang lebih luas. Rakyat akan melihat bahwa pejabat negara peduli pada ketidaknyamanan, keterbatasan,

dan bahkan ancaman degeneratif yang dihadapi rakyat. Pejabat negara pun turut merasakan dan memerhatikan hal-hal spesifik yang mereka butuhkan seperti kebersihan lingkungan, ketersediaan air, hingga dampak bencana alam, dan bekerja untuk memastikan bahwa bersama mereka, rakyat siap dan terlindungi dari tantangan lingkungan hidup.

Ideologi

Dinamika ideologis berkembang harus disikapi oleh para pejabat negara dan segenap jajarannya sebagai tantangan penerjemahan Pancasila menjadi panduan praktis di segenap aspek kehidupan nasional, dan bukan sebagai wacana filsafat semata, apalagi memperdebatkan rumusnya yang telah final. Terutama sekali, pejabat negara harus menjadi penjuror penerapan Pancasila dalam budi pekerti yang jujur dan luhur. Sebagai contoh, pejabat negara harus memperhatikan keberagaman target pelayanan publik mereka, dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah menghormati keberagaman ini dan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada. Dengan demikian, Pancasila menjadi sarana pemersatu aku, kami, kamu, kalian, dan kita semua seluruh bangsa Indonesia, dan bukan sebagai alat untuk membeda-bedakan apalagi mendiskriminasi pelayan publik terhadap penduduk, warga negara, dan segenap bangsa Indonesia.

Politik

Sistem politik yang demokratis memberikan jalan lebar bagi keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Jika mendasarkan demokrasi Indonesia pada Pancasila, maka melalui proses perwakilan, rakyat dengan kebhinnekaannya menjadi sumberdaya nasional tempat digalinya kekayaan pemikiran bangsa sebagai input bagi proses demokrasi Indonesia, yang sepatutnya disebut sistem kerakyatan (Bono, 2022).

Pejabat negara harus menjadi penjuror penerapan kebijakan yang transparan, serta pengawal penegakan hukum yang tidak tebang pilih, terutama agar tidak mencederai hak dan kewajiban serta rasa keadilan rakyat. Pejabat negara juga harus cermat memahami lansekap politik masyarakat untuk mendorong dialog yang positif dan konstruktif dengan segenap elemen bangsa meskipun mungkin memiliki keyakinan politik yang berbeda. Demikianlah maka segenap proses kebijakan publik dapat secara bertahap dikembalikan kepada sendi-sendi musyawarah mufakat dan gotong royong melalui pelibatan rakyat selaku sasaran pelayanan publik itu sendiri (Al Muchtar, 2022).

Dengan demikian, rakyat selaku konstituen dan konsumen negara tidak terseret oleh iming-iming status dan materi, serta terutama tidak dimanipulasi oleh kepentingan politik praktis. Kesemua ini juga menjadi etalase keteladanan dan kepercayaan terhadap pejabat negara yang teguh berada di jalur pengabdian kepada rakyat meskipun politik tengah menjadi panggung perebutan kekuasaan serta ambisi pribadi dan kelompok.

Ekonomi

Secara internal, pejabat negara di segenap sektor, daerah, dan tataran harus memastikan efektifitas dan efisiensi pendapatan dan belanja negara yang bebas dari korupsi. Secara eksternal, pejabat negara harus peka terhadap rakyat, memahami dan mendengarkan dengan segala sabar dan kerendahan hati terkait kebutuhan rakyat dalam bidang pencaharian dan kesejahteraan. Dimulai dari tidak menampilkan materi secara berlebihan di hadapan publik hingga menjadi duta pendayagunaan produk-produk nasional agar menjadi tuan di tanah air sendiri.

Di sini, kreatifitas, responsifitas, dan utamanya kepedulian pejabat negara untuk melihat langsung kondisi sektor riil diperlukan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih serasi, faktual, dan sesuai dengan kondisi objektif kerakyatan dan kebangsaan Indonesia. Bukan malah sebaliknya menggurui rakyat yang diabdinya dengan teori-teori asing yang sulit dicerna khalayak. Selanjutnya secara teknis dan konkrit, pejabat negara wajib menjadi penjurur dalam memberantasan bahaya laten hambatan-hambatan birokrasi, kompleksitas administrasi dan regulasi, serta kejahatan ekonomi pungutan-pungutan liar untuk mendorong usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi rakyat.

Bidang Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, dan Telematika

Di tengah segala perkembangan virtual, pejabat negara harus tetap memahami dinamika sosial budaya adat istiadat dan kemasyarakatan yang terjadi secara luring (nyata) di masyarakat. Hal ini penting agar pejabat negara tidak malah terlarut dengan tren pelunturan etika dan norma yang mengalir bersama teknologi virtual. Demikian pula kepekaan sosial budaya sangat membantu pejabat negara dalam bekerja untuk mengatasi masalah seperti ketidaksetaraan, diskriminasi, dan kemiskinan. Selain itu, perhatikan bahwa warisan budaya dan tradisi masyarakat akan menjadi kekayaan luar biasa yang perlu dilestarikan dan dipromosikan di tengah gerusan perilaku mekanistik yang makin mengglobal.

Keberadaan teknologi digital dengan demikian perlu disikapi secara seimbang sebagai tantangan sekaligus peluang. Selain permasalahan teknis teknologi informasi baik dari sisi perangkat lunak, maupun keras, yang masih sebagian sangat besar sekali diimpor, perlu diwaspadai adalah ketergantungan mutlak terhadap konektifitas dan energi listrik yang bisa melumpuhkan kehidupan nasional setara dengan taraf digitalisasinya antara lain sbb:

- Jika diterapkan dalam bidang pendidikan, maka pejabat negara wajib menguasai serta melestarikan segenap norma, keahlian, dan perangkat pendidikan-pembelajaran luring

khususnya yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan sendiri.

- Jika diterapkan dalam bidang IPTEK, maka pejabat negara wajib mendahulukan proteksi teknologi tepat guna, yaitu yang tidak sekedar berguna namun juga tepat sesuai dengan kesiapan dan kondisi masyarakat luas.
- Jika diterapkan dalam bidang media, maka pejabat negara wajib mempertahankan kemampuan pengembangan berbagai bentuk media luring dan berwujud yang ada di masyarakat seperti perbukuan, percetakan, surat kabar dan majalah, sebagai upaya konservasi danantisipasi, dan bukan sebagai motif mencari keuntungan.
- Jika diterapkan dalam bidang seni budaya dan olahraga, pejabat negara perlu menjadi pendorong IPTEK yang lebih bersenibudaya dan berolahraga, dan bukan sebaliknya sekedar mengikuti arus seni budaya dan olahraga yang semakin digital.
- Jika diterapkan dalam bidang kesehatan, maka pejabat negara wajib menjadi penjuror pengamanan regulasi, pendayagunaan produksi, dan teladan konsumsi kekayaan kearifan lokal dalam bidang kesehatan dan pengobatan.

Pertahanan Keamanan

Pejabat negara di berbagai bidang termasuk pejabat-pejabat militer harus membangun sinergi untuk menjadi daya penganda penangkal ancaman hibrida serta meningkatkan wawasan kebangsaan strategis guna mewaspadai aneka bentuk AGHT sosial,

BAGIAN EMPAT : PEJABAT NEGARA SEBAGAI
AGEN PROBLEM SOLVING BELA NEGARA

budaya, dan ekonomi yang dapat bereskalasi menjadi ancaman hankam. Selanjutnya, segenap pejabat negaraan sipil maupun militer harus membina sinergi dan kepercayaan yang baik dengan rakyat di segenap tataran, wilayah, dan bidang untuk lebih memahami kebutuhan mereka secara utuh, dan bekerja untuk memastikan bahwa segenap rakyat dilindungi dari beragam AGHT secara efektif. Dan yang terpenting tidak melupakan kesiapan jasmani lahiriah dan materiil sebagai komponen hankam guna mengantisipasi potensi invasi/agresi militer secara fisik, sekecil apapun itu.

Daftar Pustaka

- Al Muchtar, S. (2022). Mengembalikan Demokrasi ke Jalur Kerakyatan. Diambil kembali dari [Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/racpix282/mengembalikan-demokrasi-ke-jalur-kerakyatan](https://www.republika.co.id/berita/racpix282/mengembalikan-demokrasi-ke-jalur-kerakyatan)
- Bono, P. (2022). *Pancasila Sebagai Sistematika Manajemen Demokrasi*. Diambil kembali dari [Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/razxj5282/pancasila-sebagai-sistematika-manajemen-demokrasi](https://www.republika.co.id/berita/razxj5282/pancasila-sebagai-sistematika-manajemen-demokrasi)
- Dramanda, W. (2014). *Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan*. Diambil kembali dari [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Gubernur Pertama di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurniawati, L. (2013). Kontroversi Terbunuhnya Gubernur Soerjo Tahun 1948. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(2), 53-59.
- Soekarno, I. (2006). *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Susmoro, H. (2022). *Kepemimpinan Pancasila*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Tim Penulis Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. (2021). *Bela Negara Kepemimpinan Pancasila*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara. (2018b). *Modul II Implementasi Bela Negara*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.
- Trimoyo, E. (2018). Kontribusi HOS. Cokroaminoto Terhadap Pergerakan Islam di Indonesia. *MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 221-240.
- Wibisono, Y. (2020). Pemikiran H.O.S Tjokroaminoto tentang Nasionalisme-Islam. *Jurnal Populis*.

TENTANG PENULIS

Laksamana Madya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M. Tr. Opsla, Sejak 2020, Penulis diamanahi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Sesjen Wantannas). Kiprahnya pada sebuah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan masukan kepada Prsiden tentang Kebijakan-kebijakan strategis nasional.



Lahir di Tegal, 8 Februari 1965, peraih Satya Lancana Adhy Makayasa Akademi Angkatan Laut (AAL) ke -32 pada tahun 1987 ini pernah menjabat posisi penting, baik TNI AL maupun TNI, di antaranya Komandan KRI Wiratno dan KRI Lambung Mangkurat (1999-2000), Komandan Lanal Cirebon (2005-2007), Kepala Departmene Pelaut Akademi Angkatan laut (2007-2008), Komandan Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Satfib Koarmatim, 2008-2009), Asisnsten Operasi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Asosops Pangkolinlamil, 2009-2010), Paban Strategi Operasi Staf Operasi (Paban Straops Kasal, 2012-2013), Komandan Gugus Keamanan laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamla Koarmabar, 2013-2014), Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI (2014-2016), dan Kepala Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan laut (Kapushidrosal, 2016-2020).

Minat yang luar biasa pada pendidikan tampak pada rekam jejak Penulis, bukan hanya kemiliteran, baik dalam maupun luar negeri, tetapi juga pendidikan umum. Penulis adalah lulusan Administrasi

Negara Universitas W.R. Supratman (1992), teknis Perikanan Universitas Hang Tuan (2000), Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (2006), Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (2008) dan Doktoral Manajemen Sumber Daya manusia Universitas Negeri Jakarta (2017).

Semua gelar akademik tersebut menyusul pendidikan kemiliteran yang diselesaikan penulis dengan memuaskan, diantaranya On The Job Training (OJT) Jeanne D'Arc Perancis (1991), Pendidikan Spesialis Perwora (Dikspespa) Arteleri (1993), Pendidikan Lanjutan Perwira II Komando Umum (1997), Dikreg Seskoal XXXVIII (2000), Seskogab (CID) Perancis (2003), Dikreg Sesko TNI XXXVII (2010) dan PPRa Lemhannas RI (2013).

Tanda jasa dan penghargaan yang disematkan kepada penulis selain Satya Lancana Adhy Makayasa (AAL 32) adalah Satya Lancana Dwidya Sista I dan II, Satya Lancana Komandan KRI, Penghargaan Dharma Wiratama (Seskoal Dikreg 38), Penghargaan Adhy Karya Nugraha (Seskoa TNI Dikreg 37), Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha (Lemhannas PPRa 50), Satya Lancana Dharma Nusa, Satya Lancana Wira Nusa, Satya Lancana Wira Dharma, Satya Lancana Kesetiaan VIII, XVI dan XXV, Bintang Yudha Dhrama Nararya dan Bintang Jalasena Nararya.

Karya pertama Penulis lainnya antara lain; *Bunga Rampai Penetapan Batas Maritim RI-Negara Tetangga (2017)*; *Pusat Informasi Geospasial Kelautan Pushidrosal (2018)*; *Tol laut Dalam Perspektif Hidrografi (2018)*; *Kajian ROB, pasang Surut dan Tinggi Muka Tanah Pesisir DKI Jakarta Guna Mitigasi Banjir ROB di Pesisir Jakarta Utara (2018)*; *Kilas Balik Pushidrosal 2017-2018 Refleksi Kinerja Pushidrosal Sebagai Lembaga Hidrografi nasional (2018)*; *Penamaan Laut dan Samudera Tata Cara dan Implementasinya (2019)*; *Peran Hidrografi Dalam Mendukung*

Pertahanan Laut di Indoensia (2019); Standar Kualifikasi Kompetensi Hidrografi dan Oseanografi dalam Mendukung Survei Hidro-Oseanografi (2019); Standar IHO untuk Survei Hidrografi (2019); Edikis Ke-5 Februari Publikasi Khusus No 44 (Terjemahan) (2019); Valuasi dan Kontribusi Hidrografi sebagai Faktor Pengungkit Perekonomian nasional (2019); Menyiapkan Mitigasi Bencana Melalui Peningkatan Peran Lembaga Hidrografi Nasional (2019); Hubungan ROB dengan Global Warming dan Antisipasinya Terhadap Kepentingan Pertahanan dan pembangunan Nasional (2019); Peran Puhidrosal Dalam turut Mewujudkan Indoensia Sebagai Poros maritim Dunia (2019); Dewan Hidrografi Indonesia (DHI) Sebagai Wadah Pembinaan Surveiyor Hidrografi di Indoensia (2019); Implementasu Hasil training Research and Development Centre (TRDC) dalam Meningkatkan Kapasitas Kemampuan dan Kinerja Pushidrosal Sebagai Lembaga Hidrografi Nasional (2019); Kebutuhan Untuk Layanan Hidrografi Nasional-Publikasi IHO (Terjemahan) (2019); Pusat Informasi Geospasial Kelautan Indonesia (2019); Sejarah Pushidrosal Sebagai Lembaga Hidrografi Nasional (2019); Lembaga Sertifikasi Profesi Hidrografi dan Oseanografi di Indoensia (2019); The Spearhead of Sa Power: Arti penting Hidrografi, Kepemimpinan Robbani dan Poros Maritim Dunia Terbit (2019); Standardisasi Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi (2020); The Key of Maritime Decision Making (2020); Merawat Ketahanan Nasional (2022); dan Kepemimpinan Robbani (2022).

BELA NEGARA UNTUK PEJABAT NEGARA

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M. Tr. Opsla

Partisipasi dan keikutsertaan seluruh warga negara, termasuk pejabat negara dalam membela negara merupakan amanah dari konstitusi dan yuridis yang berlaku di Indonesia.

Karakter bela negara dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa "Upaya Bela Negara" adalah "sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

bela negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap bangsa dan warga negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, dan kehormatannya untuk menghadapi segala macam Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).

Upaya bela negara merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kesadaran warga negara. Ketika kesadaran tersebut telah terwujud, maka akan terbentuk suatu aksi yang mensinergikan perwujudan kesadaran segenap elemen masyarakat dan bangsa untuk mewujudkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan persatuan bangsa dan negara, demi mewujudkan negara yang berdaulat adil dan Makmur.